

POLA PEMBERDAYAAN PETANI BERDASARKAN TUPOKSI BALAI PENYULUHAN PERTANIAN (BPP) BERBASIS PROGRAM KOSTRATANI DI WILAYAH JAWA

Cut Rabiatul Adawiyah^{1*}
Iwan Setiajie Anugrah²

1) Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan
Pertanian, Bogor, Indonesia

2) Pusat Riset Kesejahteraan Sosial,
Desa dan Konektivitas BRIN, Indonesia

Article history

Received : Desember 2024

Revised : Desember 2024

Accepted : January 2025

*Corresponding author

Email : cnoni89@gmail.com

Abstrak

Komando Strategis Pembangunan Pertanian atau KOSTRATANI merupakan salahsatu program nasional yang digagas oleh Kementerian Pertanian, dengan tujuan mempercepat kegiatan pemberdayaan petani berbasis diseminasi dan informasi dari Pusat ke Petani dan sebaliknya, melalui tugas, fungsi dan peran Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai institusi strategis pelaksana program dari kecamatan. Pengumpulan data dan informasi diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan secara purposive melalui survey dan studi kasus di wilayah BPP Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Subang, Indramayu dan Kuningan. Metode penulisan artikel dilakukan secara deskriptif kualitatif dari kasus-kasus pemberdayaan petani di masing-masing lokasi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pola pemberdayaan petani melalui program KOSTRATANI sebagai inisiasi percepatan konektivitas dan tranformasi BPP sebagai pusat data-informasi, gerakan pembangunan pertanian, pembelajaran, konsultasi agribisnis serta pengembangan jejaring dan kemitraan, masih dihadapkan pada terbatasnya perangkat dan penguasaan teknologi informasi, terutama sarana yang terkait dengan penggunaan aplikasi mendukung program percepatan diseminasi serta teknologi komunikasi antara para petani dengan petugas atau para penentu kebijakan di Kabupaten, Provinsi hingga Pusat dan sebaliknya secara langsung melalui sistem AWR (*Agricultural War Room*). Sinergi peran dan koordinasi mendukung pola pemberdayaan ini masih perlu ditingkatkan antara Kementerian Pertanian berikut Dinas/Instansi terkait di Daerah (provinsi dan kabupaten) serta secara bersama melakukan pemenuhan sarana-prasarana, peningkatan kapasitas petugas serta pendampingan para petani sebagai langkah awal pemberdayaan berbasis aplikasi teknologi informasi dan tugas, peran dan fungsi BPP setempat.

Kata kunci : Pemberdayaan, Kostratani, BPP, Teknologi Informasi, Pertanian

Abstract

The Agricultural Development Strategic Command or KOSTRATANI is one of the national programs initiated by the Ministry of Agriculture, with the aim of accelerating farmer empowerment activities based on dissemination and information from the Center to Farmers and vice versa, through the duties, functions and role of the Agricultural Extension Center (BPP) as a strategic institution implementing the program from the district. Data and information collection was obtained from the results of research conducted purposively through surveys and case studies in the BPP areas of West Bandung Regency, Subang Regency, Indramayu and Kuningan. The method for writing articles is qualitative descriptive based on cases of farmer empowerment in each location. The research results show that the pattern of farmer empowerment through the KOSTRATANI program as an initiation to accelerate connectivity and transformation of BPP as a data-information center, agricultural development movement, learning, agribusiness consultation and network and partnership development, is still faced with limited equipment and mastery of information technology, especially the facilities related to the use of applications to support accelerated dissemination programs and communication technology between farmers and officers or policy makers in the District, Province to the Center and vice versa directly through the AWR (*Agricultural War Room*) system. The synergy of roles and coordination to support this empowerment pattern still needs to be improved between the Ministry of Agriculture and the relevant Departments/Agencies in the Regions (provinces and districts) and jointly fulfill the provision of infrastructure, increase the capacity of officers and assist farmers as the first step to empowerment based on information technology applications. and duties, roles and functions of the local BPP.

Keywords: Empowerment, Kostratani, BPP, Information Technology, Agriculture

PENDAHULUAN

Salah satu sektor yang menjadi pilar penting dalam mewujudkan pembangunan ekonomi Indonesia adalah sektor pertanian. Pentingnya peranan sektor pertanian dalam kehidupan manusia, karena berkaitan dengan fungsinya sebagai penyedia pangan, pakan untuk ternak, serta energi. Besarnya peran pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia sangat berpengaruh pada kinerja pembangunan secara keseluruhan, sekalipun dalam prosesnya masih harus bersinergi dengan sistem penyangga kehidupan yang lain. Terjadi peningkatan konsumsi pangan beberapa tahun terakhir ini, seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi dan ancaman wabah penyakit. Peran penting sektor pertanian juga sangat dominan, pada saat terjadinya kondisi pandemi Covid-19 hingga membuat sektor pertanian menempati posisi yang semakin sentral (Kementan 2020).

Dalam rangka peningkatan skala ekonomi nasional khususnya peningkatan peran dari sektor pertanian, maka penerapan inovasi teknologi pertanian merupakan langkah utama pembangunan pertanian nasional yang harus segera ditempuh agar sektor pertanian dapat berkontribusi besar terhadap peningkatan sasaran makro pembangunan dan pemenuhan kebutuhan pangan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sistem informasi teknologi dalam pembangunan pertanian juga menjadi tuntutan saat ini dan ke depan, mendukung sistem usaha pertanian berbasis teknologi sekaligus peningkatan produksi hasil pertanian. Langkah nyata yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian untuk menuju pertanian maju, mandiri dan modern sebagai kontrak politik dalam pembangunan pertanian dan pembangunan nasional sekaligus menjadi rencana strategis sektor pertanian bagi pembangunan ekonomi secara nasional. Untuk mewujudkan pertanian yang maju, mandiri dan modern, Kementerian Pertanian selain melakukan transformasi kelembagaan, sistem pendataan, penguatan BPP juga menyiapkan berbagai program terkait dengan pembangunan sektor pertanian, sebagai upaya mendukung model pemberdayaan para petani dalam proses berusahatani.

Tahun 2019 Kementerian Pertanian juga telah menyusun program prioritas yang meliputi kegiatan (1) memperbaiki data pangan, termasuk kejelasan dan keserasian data suatu lahan dan komoditas yang akan dipanen dari tingkat kecamatan hingga pusat agar dapat dimonitor, (2) memanfaatkan teknologi sebagai pendorong kemajuan sektor pertanian melalui penggunaan Artificial Intelligence (AI) dan pemanfaatan citra satelit, (3) pengendalian pertanian melalui De-Birokrasi yang akan dipadukan dengan pemanfaatan Informasi dan teknologi yang akan dipusatkan ditiap Kecamatan (Kementan, 2020, Bekti et al., 2023). Program prioritas ini ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan pada sektor pertanian secara efektif. Program prioritas ini kemudian diberikan nama Komando Strategi Pembangunan Pertanian (Kostratani). Peluncuran Program Kostratani ini ditujukan untuk meningkatkan optimalisasi tugas, fungsi dan peran (BPP) ditingkat kecamatan. Target jangka pendek dari Program Kostratani adalah untuk memenuhi sarana, prasarana, kelembagaan, kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pertanian dan penyelenggaraan pertanian di kecamatan berbasis teknologi informasi (Bekti et al., 2023).

Program Kostratani juga sekaligus merupakan salah satu program andalan Kementerian Pertanian dalam hal peningkatan kemampuan penyuluh dan lembaganya. Sesuai dengan

Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 13/kpts/07.050/I/02/2020 tentang petunjuk pelaksanaan Komando Strategis Pembangunan Pertanian di Kabupaten, Kostratan merupakan reformasi pembangunan pertanian nasional gerakan berbasis teknologi informasi, sebagai gerakan satu komando yang bertahap mulai dari kecamatan sampai dengan pusat dalam hal pengawasan, pengembangan, pemantauan, pengumpulan dan pengolahan serta penyajian data dan informasi terkait program pembangunan pertanian dengan melibatkan seluruh pihak. eselon 1 lingkup kementerian pertanian dan kementerian/lembaga terkait lainnya (Veronice et al., 2022).

Proses transformasi dan akselerasi BPP sebagai pusat data dan informasi masyarakat, kemudian menjadi BPP Kostratani dapat memberikan informasi potensi daerah, teknologi pertanian serta informasi pasar hingga penerapan sistem pemberdayaan petani berdasarkan tugas, peran dan fungsi masing-masing BPP Kostratani. Sebagai pusat pembelajaran, BPP Kostratani diperuntukkan bagi penyuluh, petani, dan Gapoktan atau gabungan kelompok tani hingga petani di desa untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pertanian sebagai sumber daya manusia. Sebagai pusat konsultasi agribisnis, seharusnya BPP Kostratani berperan sebagai sekretariat konsultasi agribisnis bagi petani hingga swasta untuk meningkatkan usaha pertanian dalam skala usaha. Begitu pula dengan peran BPP Kostratani sebagai pusat pengembangan jaringan kerjasama. Brigade Kostratani akan memberikan akses dan informasi, sehingga dapat terjalin kerjasama di bidang pertanian. Mulai dari akses permodalan hingga kemitraan bisnis lainnya yang tentunya membutuhkan jaringan kerjasama untuk berkembang dalam skala bisnis (Adawiyah et al 2021, Anugrah et al 2021).

Berdasarkan pada latar belakang diterapkannya program kostratani di tingkat BPP, maka penulisan materi artikel ini bertujuan untuk menganalisis proses akselerasi dan implementasi program kostratani dan kesiapan kelembagaan BPP di tingkat kecamatan dalam melaksanakannya, hingga secara konseptual menjadi salahsatu model transformasi sistem pemberdayaan BPP terhadap para petani di wilayah kerja BPP. Informasi yang diperoleh hasil lapangan dan beberapa hasil kajian lainnya diharapkan memberikan informasi yang komprehensif tentang kondisi eksisting kelembagaan BPP serta secara konseptual kesiapan peran, tugas dan fungsi BPP dalam kaitan kostratani hingga implementasinya.

METODE PELAKSANAAN

Materi artikel ini ditulis berdasarkan data dan informasi hasil kegiatan penelitian pada saat program kostratani gencar diakselerasikan oleh Kementerian Pertanian secara nasional. Penulisan artikel dilakukan melalui metode penulisan secara deskriptif kualitatif atas dasar hasil wawancara dan pengumpulan data di lapangan. Lokasi penelitian dilakukan secara purposif di beberapa BPP di wilayah Jawa Barat yang ditunjuk untuk menjadi BPP model kostratani di wilayah kerja Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Kuningan. Penggalan data dan informasi dilakukan kepada responden yang sebagian besar merupakan para penyuluh pertanian yang bertugas di masing-masing BPP yang menjadi lokasi penelitian. Selain para penyuluh, beberapa kelompok tani penerima manfaat kegiatan BPP juga

menjadi responden untuk mendapatkan respon balik atas program kostratani yang akan dijalankan oleh BPP di wilayahnya. Deskripsi penulisan artikel disusun berdasarkan beberapa topik bahasan, dimana satu sama lain berkaitan, sehingga memberikan kejelasan substansi artikel secara komprehensif.

HASIL PEMBAHASAN

Tugas Pokok, Fungsi dan Peran Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan

BPP adalah lembaga penyuluhan pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi penyuluhan pertanian pada tingkat kecamatan dengan wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan (Kementan 2020). Balai Penyuluhan Pertanian yang dimaksud mempunyai peran yang sangat penting dalam kemajuan suatu kelembagaan petani yang menjadi dasar keberhasilan sistem penyuluhan pertanian. Pakpahan et al (2021) menguatkan tentang kedudukan BPP, bahwa pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Balai Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf d mempunyai tugas: (a) menyusun program penyuluhan pada tingkat kecamatan sejalan dengan program penyuluhan kabupaten/kota; (b) melaksanakan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan; (c) menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan, dan pasar; (d) memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha; (e) memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh PNS, penyuluh swadaya, dan penyuluh swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan; dan (f) melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha.

Dengan demikian, BPP merupakan institusi pertanian terdepan di tingkat lapangan, di kecamatan, setiap BPP dibagi ke dalam wilayah-wilayah kerja penyuluh pertanian. Penguatan fungsi dan peran BPP berarti memperkokoh pembangunan pertanian. Penguatan mencakup data dan informasi, SDM, sarana prasarana dan infrastruktur. BPP adalah sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam memberikan penyuluhan pertanian kepada masyarakat di tingkat kecamatan. Dengan tugas pokoknya, Balai Penyuluhan Pertanian kecamatan memiliki fungsi yang sangat penting dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam mengelola usaha pertanian. Selain itu, Balai Penyuluhan Pertanian kecamatan juga memiliki peran sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat petani dalam hal pengembangan dan penerapan teknologi pertanian yang lebih modern dan efisien.

Dengan adanya Balai Penyuluhan Pertanian kecamatan, diharapkan dapat tercipta hubungan yang harmonis antara pemerintah dan petani, sehingga program-program pertanian yang dicanangkan dapat terlaksana dengan baik. Selain itu, Balai Penyuluhan Pertanian kecamatan juga dapat menjadi pusat informasi dan pelatihan bagi petani, sehingga mereka dapat terus mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam bidang pertanian. Melalui upaya-upaya penyuluhan yang dilakukan, diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani di tingkat kecamatan.

Tugas BPP dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian maka dapat dilakukan dengan dukungan antara lain inovasi teknologi, sarana prasarana pertanian, peraturan perundang-undangan terkait pertanian, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian. di tingkat petugas/aparat maupun di tingkat petani sebagai pelaku usaha pertanian. Selanjutnya untuk melakukan penguatan kapasitas BPP, Menteri Pertanian telah mencanangkan program baru yang terdapat dalam Permentan No. 49 Tahun 2019 Tentang Komando Strategis Pembangunan Pertanian (Kostratani) (Kementan 2019, 2020). Dengan peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani di tingkat kecamatan, diharapkan juga dapat berdampak positif pada ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Selain itu dalam konteks yang lebih luas, adanya Balai Penyuluhan Pertanian kecamatan juga dapat memperkuat kedaulatan pangan negara dengan meningkatkan produksi pertanian secara berkelanjutan. Melalui kerjasama yang baik antara pemerintah, petani, dan masyarakat, diharapkan dapat menciptakan sistem pertanian yang lebih efisien, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi.

Pendekatan Konseptual Kostratani dalam Pembangunan Pertanian dari Kecamatan

Komando Strategis Pembangunan Pertanian yang selanjutnya disebut Kostratani merupakan suatu gerakan pembaharuan pembangunan pertanian nasional berbasis Teknologi Informasi, yang berada ditingkat kecamatan melalui optimalisasi tugas, fungsi dan peran Balai Penyuluhan Pertanian dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan pertanian (Kementan 2020; Winarsih et al. 2020; Anugrah et al. 2021). Kostratani sebagai pusat gerakan pembangunan pertanian kecamatan dalam mensinergikan semua kegiatan pembangunan pertanian seluruh unit eselon I lingkup Kementerian Pertanian dan kegiatan lintas Kementerian/ Lembaga dalam pelaksanaan program dan kegiatan di kecamatan (Kementan 2020; Anugrah et al. 2021).

Pendekatan konseptual Kostratani dalam Pembangunan Pertanian dari Kecamatan merupakan langkah yang penting untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani di daerah tersebut. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Kostratani, petani diharapkan dapat lebih efektif dalam mengelola lahan pertanian mereka dan memaksimalkan hasil panen. Selain itu, pendekatan ini juga dapat membantu meningkatkan keberlanjutan lingkungan dan mengurangi dampak negatif dari praktik pertanian konvensional. Kostratani berperan sebagai pusat data dan informasi, pusat gerakan pembangunan pertanian, pusat pembelajaran, pusat konsultasi agribisnis, dan pusat pengembangan jejaring kemitraan. Melalui Kostratani akan terjadi sinergi dan saling melengkapi dalam satu pola sikap dan pola tindak pembangunan pertanian sampai pada tingkat lapangan. Sinergi yang harmonis dalam membangun pertanian nasional akan termonitor melalui *Agriculture War Room* (AWR) di Pusat. AWR akan menjadi pusat pembangunan pertanian yang secara langsung akan dipantau dan dikendalikan oleh Menteri Pertanian bersama tim, dan terkoneksi dengan *Agriculture Operational Room* (AOR) di seluruh wilayah Indonesia, dari tingkat provinsi hingga kecamatan melalui Kostratani.

Sebagai gerakan satu komando sekaligus merupakan suatu gerakan pembaharuan pembangunan pertanian nasional berbasis Teknologi Informasi. Sebagai gerakan satu komando secara berjenjang mulai dari kecamatan sampai dengan pusat dalam hal supervisi, pembinaan, pemantauan, pengumpulan dan pengolahan serta penyajian data dan informasi terkait program pembangunan pertanian dengan melibatkan semua eselon 1 lingkup Kementerian Pertanian dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya. Kostratani merupakan Komando Strategis Pembangunan Pertanian Nasional yang berkedudukan di kecamatan (Anugrah et al., 2021).

BPP sebagai pusat gerakan Kostratani di kecamatan perlu dioptimalkan tugas, fungsi dan perannya melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Dalam upaya percepatan pencapaian program pembangunan pertanian strategis Kementan, maka salah satu tugas, fungsi yang terkait dengan peran BPP dalam kegiatan kostratani, adalah sebagai Pusat Data dan Informasi Pertanian di Kecamatan. Pusat data dan informasi pertanian yang diperankan ini, mencakup data statistik pertanian dan sumber daya manusia pertanian yang disajikan dalam *Agricultural Operation Room* (AOR) dan selanjutnya akan disampaikan ke *Agricultural War Room* (AWR) di Kostratanas. Sementara tugas, fungsi dan peran Pusdatin, merupakan pusat data dan informasi pertanian secara nasional yang berkedudukan di Pusat (Kementerian Pertanian), sekaligus sebagai penyedia dan pensupply data pembangunan pertanian nasional untuk digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Menteri Pertanian atau pejabat eselon 1 lainnya dalam kegiatan AWR tersebut. Pusdatin memegang tugas dan fungsi sebagai pusat data Kementerian Pertanian, sehingga menjadi “satu data” pertanian nasional (Kementan 2020).

Mekanisme dan sumber data Pusdatin juga diperoleh dari hasil kegiatan pendataan yang dilakukan oleh masing-masing Tim Supervisi dan Pendampingan gerakan Kostratani kecamatan, melalui Penanggungjawab (PJ) di masing-masing Kabupaten dan Provinsi, dilaporkan secara kumulatif mingguan (2 kali seminggu) serta data kumulatif bulanan yang diinput melalui aplikasi yang sudah ditetapkan oleh Pusdatin, meliputi 13 jenis data Program dan Kegiatan Utama Kementerian Pertanian yang dilaporkan berdasarkan indikator-indikatornya, meliputi data: (1) Ketersediaan komoditas strategis; (2) Komoditas strategis; (3) KUR; (4) Peningkatan ekspor; (5) Alsintan; (6) penurunan losses; (7) UMKM pertanian; (8) Petani milenial; (9) Daerah rawan pangan; (10) Stunting; (11) Investasi; (12) Penyerapan tenaga kerja; dan (13) BPP. Menurut Kepmentan Nomor 84/KPTS/OT.050/M/01/2020, pengiriman data dilakukan melalui aplikasi yang disusun berdasarkan SOP pengisian yang ditetapkan Pusdatin dan dalam aplikasi tersebut data diinput secara mingguan (Kementan 2019, 2020)

Dari catatan hasil penelitian Anugrah et al. 2021 diperoleh informasi bahwa keterkaitan dengan sistem pelaporan sekaligus sebagai tindak lanjut dari SK Mentan No 84/KPTS/OT.050/M/01/2020 tentang Supervisi dan Pendampingan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Utama kementerian Pertanian serta dalam rangka melakukan pemantauan ketersediaan dan Harga Pangan tahun 2020, ditugaskan kepada Penanggungjawab Provinsi, bersama-sama dengan para penanggungjawab Kabupaten/Kota untuk melakukan validasi dan

melaporkan data lapangan dengan mengikuti langkah-langkah yang ditetapkan, serta dengan format isian laporan yang sudah ditetapkan. Langkah-langkah pelaporan, yaitu melaporkan indikator Program dan Kegiatan Utama Kementerian Pertanian sampai level kecamatan. Selain itu juga melaporkan indikator ketersediaan, kebutuhan, neraca dan harga pasar 11 bahan pangan pokok level Kabupaten/Kota, meliputi beras, jagung, daging sapi, daging ayam, telur ayam, minyak goreng, gula pasir, cabai rawit, cabai keriting, bawang merah dan bawang putih (PUSLUHTAN, 2020).

Secara teknis, sistem pelaporan data melalui aplikasi Pusdatin, dilakukan dengan memasukan data laporan kemajuan indikator Program dan Kegiatan Utama Kementerian Pertanian serta ketersediaan dan harga pangan pokok mingguan secara online, paling lambat setiap hari Jumat jam 14.00 waktu setempat. Absensi pengisian oleh penanggungjawab Kabupaten/Kota di bawah koordinasi penanggungjawab provinsi dan rekapitulasi laporan mingguan oleh Pusdatin akan dilaporkan kepada Menteri Pertanian, pada setiap hari Jumat dan pada hari Senin akan dibahas pada Rapat Pimpinan Kementerian Pertanian (Anugrah et al. 2021)

Mengacu pada kebutuhan data yang disampaikan dalam indikator kinerja dan sebagian besar merupakan implementasi dari rancangan program Kostratani, maka sistem pelaporan dilakukan berdasarkan komoditas strategis (nasional maupun daerah setempat). Pola dan mekanisme pengumpulan data dan pelaporan sebagai implementasi indikator kinerja, secara rinci disampaikan dalam aplikasi Pusdatin. Sistem pelaporan untuk indikator-indikator lainnya juga akan dilakukan melalui mekanisme dan sistem pelaporan yang nanti akan dibangun. Mekanisme tersebut telah disusun dalam bentuk konsep SOP pelaporan, mengikuti alur pelaporan secara nasional, untuk pelaporan data yang dikumpulkan secara mingguan.

Informasi tentang kondisi serta kemampuan BPP beserta sumber daya manusia, sarana prasarana pendukung kegiatan BPP saat ini serta menjadi penting, sebagai dasar untuk dapat melaksanakan tugas-tugasnya yang baru dalam struktur pusat gerakan kostratani di kecamatan. Hal ini mengingat kondisi dan manajemen kinerja di setiap BPP secara nasional masih sangat beragam, termasuk tingkat kemampuan operasional dan sarana pendukung kegiatan tugas, fungsi dan peran BPP sebagian besar masih sangat terbatas.

Program pembangunan pertanian yang berbasis di kecamatan, melibatkan peran BPP sebagai simpul pelaksanaannya, termasuk dalam sistem pelaporan data pertanian yang setiap saat terhubung dengan jejaring sumber data lainnya baik di daerah hingga ke pusat dalam sistem pelaporan secara online dan real time. Dengan informasi dari pusat dan hasil temuan kondisi di lapangan, diharapkan dapat memberikan masukan informasi bagi para pemangku kepentingan berikut para pengambil kebijakan di pusat dan daerah, terutama dalam rangkaian membangun sinergi mendukung akselerasi dan penyempurnaan pelaksanaan gerakan kostratani dan program pembangunan pertanian strategis nasional yang sudah ditetapkan oleh Kementan.

Balai penyuluhan pertanian sebagai pengimplementasi Program Kostratani memiliki fungsi sebagai penghubung antara pemerintah dengan masyarakat petani. Penyuluh memiliki peran untuk menyampaikan informasi secara bottom-up, sehingga pendekatan penyuluhan

dapat dilakukan dengan instruktif dan meningkatkan partisipasi dari seluruh komponen yang terlibat (Dayat, 2017). Penyampaian informasi ini perlu dilakukan secara instan dan terintegrasi melalui satu gerbang informasi yaitu *Agriculture War Room (AWR)*. Melalui Kostratani pemerintah melakukan upaya perbaikan secara progresif dengan harapan tercapainya keserasian data dan dapat diakses secara real-time melalui AWR.

Pendekatan konseptual Kostratani juga sangat terkait dengan upaya peningkatan BPP di tingkat kecamatan dan pemberdayaan penyuluh serta para petani untuk mendongkrak produktivitas pertanian melalui program strategis Kementerian Pertanian tahun 2020-2024. Kostratani juga merupakan langkah optimalisasi tugas, fungsi dan peran BPP yang berbasis teknologi informasi, dimana fase pembangunan pertanian dituntut memasuki era 4.0 yaitu proses transformasi digital sektor pertanian serta pengembangan dan pemanfaatan teknologi digital di bidang pertanian. Tantangan pertanian 4.0 meliputi peralatan pertanian analog, keterampilan memanfaatkan media, infrastruktur telekomunikasi di pedesaan, keamanan data pertanian, manajemen *big data* dan integrasi data aplikasi pertanian. Tantangan tersebut akan menjadi peluang dengan menerapkan teknologi digitalisasi di sektor pertanian. Implikasi yang terjadi akibat adanya transformasi peran BPP yaitu (1) perubahan mendasar di bidang perencanaan data dan informasi; (2) data, program dan kegiatan ada di BPP; (3) seluruh institusi memasukan data ke website BPP/rumah data BPP; (4) perencanaan program dan kegiatan berbasis wilayah/kecamatan; (5) diperlukan *dashboard* koordinasi di level terbawah/kecamatan; dan BPTP sebagai sekretariat wilayah dapat berperan sebagai penganalisis program dan kegiatan pembangunan pertanian di wilayah. Kunci sukses pembangunan pertanian dalam program ini dilakukan secara fokus, terpadu, sinergi, kolaborasi, data base, transparansi, tertelusur, terakses dan semua itu didukung dengan adanya teknologi informasi yang baik (PUSLUHTAN, 2020).

Tantangan, Kinerja dan Peran BPP sebagai Pelaksana Kebijakan Program Pusat-Daerah

Kesenjangan tugas, fungsi dan peran BPP sebagai simpul dan basis pengelolaan pembangunan pertanian di kecamatan terutama pada saat diawal pelaksanaan rancangan gerakan sangat ditentukan dengan kondisi kegiatan yang selama ini dijalankan oleh BPP serta atas ekspektasi rancangan hingga implementasi program yang menetapkan BPP menjadi pusat pengelolaan kegiatan program-program pembangunan dari kecamatan. Intensitas dan konsentrasi dari para pemangku kepentingan di pusat dan daerah terkait dengan introduksi program pembangunan pertanian yang dilaksanakan di tingkat BPP juga menjadi meningkat. Hal ini karena bagaimanapun kinerja institusi terkait yang dipimpinya menjadi bagian dari rangkaian proses atas keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan rancangan program yang semuanya bermuara di BPP sebagai pusat kegiatan program di kecamatan. Namun demikian banyak yang masih perlu dibenahi terkait target capaian dari pelaksanaan program/kegiatan dengan kondisi dan kemampuan di masing-masing BPP, meliputi SDM, manajemen yang sinergi kinerja serta prasarana dan sarana yang ada dan diperlukan mendukung pelaksanaan masing-masing program (Anugrah et al. 2021).

Pemberdayaan petani melalui BPP kostratani memerlukan proses transformasi yang didukung pemenuhan fasilitasi pendukung, terutama jaringan IT dan sistem digital. Untuk menuju BPP kostratani juga sangat diperlukan kesiapan SDM di BPP berikut para penyuluh untuk memahami serta dituntut mampu mengoperasionalkan perangkat yang terhubung dengan berbagai aplikasi terkait program pembangunan pertanian sekaligus pemberdayaan para petani berbasis aplikasi digitalisasi. Pada kenyataannya, sebagian SDM penyuluh hampir di semua lokasi BPP yang menjadi responden, rata-rata telah berusia lanjut dan menunggu waktu pensiun dan minus penguasaan teknologi yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan program sebagai upaya pemberdayaan petani yang menjadi target binaannya.

Menjadi BPP kostratani juga sangat dituntut terhadap sarana pendukung kinerja BPP. Kondisi dan kesiapan berbagai BPP di lokasi penelitian dalam penyediaan jaringan internet, perangkat pendukung TI melalui server dan pemenuhan kuota internet di masing-masing lokasi masih sangat terbatas. Para penyuluh di setiap BPP harus selalu melakukan "iuran" pembelian pulsa internet untuk memenuhi tugas dan kinerja pelaksanaan kegiatan yang telah menjadi tugasnya. Pelaporan data berbagai program pembangunan pertanian yang dituntut dilaporkan secara cepat dan terhubung secara online, telah mendorong pengeluaran secara swadana masing-masing penyuluh menjadi lebih besar dibandingkan dengan tunjangan/insentif yang mereka terima setiap periode bulannya.

Secara formal kedudukan BPP menjadi perpanjangan tangan Dinas Pertanian di tingkat Kabupaten. Dalam hal ini, bagi Pemkab yang memiliki kelebihan anggaran belanja dan pendapatan daerah, diantaranya ada beberapa Dinas Pertanian atau pemerintah kabupaten yang secara langsung "mau" mengalokasikan dana dan anggaran kegiatan untuk alokasi pendukung kegiatan pelaporan di masing-masing BPP untuk membantu biaya operasional BPP, dalam kaitan pemasangan jaringan internet berikut pembayaran abudemen pulsa internet setiap bulan. Namun demikian bagi kabupaten lain yang defisit anggaran dan tidak ada kebijakan pimpinan untuk itu, maka anggaran pendukung kegiatan di BPP juga tidak diakomodasikan dalam dinas instansi yang menjadi induk struktural BPP di masing-masing daerahnya.

Dari kegiatan penelitian di wilayah Jawa Barat, meliputi lokasi BPP di Kabupaten Subang, Indramayu dan Kuningan diperoleh informasi bahwa untuk melakukan transformasi tugas pokok, fungsi dan peran kelembagaan BPP dari BPP konvensional menjadi BPP Kostratani, masih dihadapkan pada beberapa kendala yang juga pada umumnya dihadapi oleh setiap BPP secara nasional. Keterbatasan sarana-prasarana pendukung penggunaan IT yang dimiliki BPP saat ini berikut perangkat dan jaringan yang dipersyaratkan menjadi BPP kostratani.

Jumlah dan kemampuan penguasaan IT dari setiap sumberdaya manusia di BPP meliputi tenaga penyuluh terhadap berbagai aplikasi program yang berbasis internet dan IT juga masih terbatas. Relevansi atas rasio ketimpangan antara jumlah tenaga penyuluh dengan luas wilayah desa binaan BPP masih dihadapi oleh BPP di lokasi Penelitian. Rasio ideal dalam kegiatan penyuluhan yang dikoordinasikan oleh BPP adalah satu desa satu penyuluh. Namun dalam kenyataannya masih terdapat petugas penyuluh yang mempunyai tanggungjawab untuk lokasi

lebih dari satu desa, sehingga waktu untuk melaksanakan kegiatan kostratani juga terbatas (Izmi et al., 2021).

Intensitas pekerjaan yang begitu tinggi atas pelaporan dan pelaksanaan berbagai program pembangunan pertanian baik yang berasal dari Kementan, Dinas terkait dari Provinsi atau Kabupaten bahkan program lain lintas institusi/lembaga yang difokuskan di desa menjadi bagian yang harus diselesaikan oleh para penyuluh di BPP. Banyaknya program yang harus ditangani BPP dan para penyuluhnya, ditambah dengan begitu banyaknya program dari seluruh Esselon I Kementan yang dibungkus dalam kostratani, sangat merepotkan waktu kegiatan para penyuluh melakukan tugas, fungsi dan perannya dalam proses penyuluhan. Banyak para penyuluh di BPP saat ini terjebak dengan urusan administrasi dan penyelesaian dari implementasi program tentang kartu tani, asuransi pertanian, penyusun RDKK dan CPCL untuk pupuk bersubsidi serta kegiatan lainnya diluar tupoksi mereka sebagai penyuluh pertanian lapangan (Anugrah et al. 2021)

Dengan kondisi lapangan seperti ini menunjukkan bahwa sinergi kesiapan perangkat dan fasilitasi pendukung terlaksananya program kostratani patut dipertimbangan menjadi bagian perencanaan program pembangunan pertanian nasional. Pertimbangan atas kondisi masing-masing BPP berikut jumlah dan kemampuan SDM di masing-masing lokasi BPP serta wilayah kerjanya termasuk fasilitasi pembiayaan operasional pendukung akselerasi kostratani, menjadi bagian penganggaran dan pertimbangan dari masing-masing program eselon 1 yang secara konseptual telah dipadukan dalam program kostratani Kementerian Pertanian. Sinergi peran kelembagaan yang dibentuk secara berjenjang dari kostratani, konstada, kostrawil hingga kostratanas (pusat), berikut peran masing-masing institusi terkait di daerah hingga pusat sangat besar artinya bagi proses pelaksanaan program kostratani, hingga mencapai tujuan yang diharapkan serta berkelanjutan.

KESIMPULAN

Secara nasional program kostratani menjadi salahsatu upaya pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian untuk mendukung peningkatan dan eksistensi berbagai program pembangunan pertanian yang dimulai dari kecamatan. Keterlibatan peran BPP di kecamatan dalam program kostratani sangat penting artinya dalam mengkoordinasikan berbagai program eselon 1 kementerian pertanian yang diikat dalam kostratani hingga mencapai sasaran dari masing-masing program. Tugas BPP menjadi sangat berat selain juga harus melaksanakan dan menjalakan tugas, fungsi dan perannya sebagai petugas penyuluhan pertanian yang mempunyai tanggungjawab atas desa binaannya, kelompokkani hingga para petani sebagai pengguna hasil-hasil inovasi BPP yang selama ini dijadikan sebagai sumber segala inovasi bagi pemberdayaan dan kemajuan petani di masing-masing wilayah desa yang menjadi binaan dan lokasi tugas masing-masing penyuluh. Tingginya intensitas pekerjaan dan masih terbatasnya sarana pendukung, jumlah rasio SDM dengan lokasi binaan di masing-masing lokasi BPP berikut keterjangkauannya, maka generalisasi program kostratani terhadap seluruh BPP secara nasional perlu ditinjau kembali serta dibuatkan skala prioritas atas masing-masing kondisi BPP secara nasional, agar program ini bisa berjalan sesuai kemampuan masing-masing

BPP. Peran serta Pemerintah Daerah Kabupaten menjadi urgen dalam mendukung tugas dan fasilitasi masing-masing BPP, selaras dengan kedudukan secara formal bahwa BPP merupakan lembaga yang secara administrasi dan pelaporan bertanggungjawab kepada Bupati sebagai kepala daerah di wilayahnya, melalui kepala dinas pertanian setempat.

PUSTAKA

Adawiyah CR, IS Anugrah, S Wahyuni, M Syukur, SH Suhartini, KS Indraningsih, H Tarigan, T Pranadji, J Mulyono and H Hermawan. 2021 The existing and expectations of BPP capacity in the strategic command for agricultural development program. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science (2021) 012090 -. ICANaRD 2021 - IOP Publishing. doi:10.1088/1755-1315/892/1/012090.

Anugrah IS, M Syukur, T Pranadji, S Wahyuni, KS Indraningsih, SH Suhartini, H Tarigan, CR Adawiyah, J Mulyono, H Hermawan. 2021. Kemanfaatan Balai Penyuluhan Pertanian sebagai Simpul Pelayanan Pembangunan Pertanian di Tingkat Kecamatan [Laporan Hasil Penelitian] Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian TA 2021. Bogor.

Bekti MA, S Gayatri, AS Prasetyo. 2023. Implementasi Program Kostratani di Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Gunung Pati. Jurnal MAHATANI Vol.6. No 1, Juni 2023. P-ISSN: 2622-2896 E-ISSN: 2721-513X.

Dayat, D. (2017). Persepsi Penyuluh Pertanian dalam Penyelenggaraan Penyuluhan Era Otonomi Daerah. *Jurnal Penyuluhan Pertanian*, 12(1), 27-39. <https://doi.org/10.51852/jpp.v12i1.339>.

Izmi DS, MR Yulaicho dan ER Nawangsari. 2021. Implementasi Kebijakan Program Komando Strategis Pembangunan Pertanian (Kostratani) di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* ISSN 2622-3740 (Online) Vol 4, No. 2, November 2021: 702-710, DOI: 10.34007/jehss.v4i2.729:

[KEMENTAN] Kementerian Pertanian Republik Indonesia. 2019. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Komando Strategis Pembangunan Pertanian.

[KEMENTAN] Kementerian Pertanian Republik Indonesia. 2020. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13/Kpts/OT.050/I/02/2020. Tentang Petunjuk Pelaksanaan Komando Strategis Pembangunan Pertanian di Kecamatan.

- Pakpahan TE, M Wicaksono, Q Handary. 2021. Peran Balai Penyuluhan Pertanian sebagai Pusat Data Informasi Pertanian dalam Mendukung Program Kostratani. *Jurnal Agribisnis Terpadu*, Vol. 14 No. 1 Juni 2021: 46-67. ISSN 1979-4991 e-ISSN 2549-0060.
- [PUSLUHTAN] Pusat Penyuluhan Pertanian. 2020. Petunjuk Teknis dan Standar Operasional Prosedur Balai Penyuluhan Pertanian Komando Strategis Pembangunan Pertanian di Kecamatan. Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian. BPPSDMP.
- Veronice, F Azel, B Warman. 2022. Analysis of Agricultural Explanation Centers in the Implementation of the Agricultural Development Strategy Command Program (Konstratani). *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding (IJMMU)* Vol. 9, No. 12, December 2022.
- Winarsih, A., D Mastuti, DT Yunandar. (2020). Peningkatan Kinerja melalui Program Kostratani di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Prafi, Kabupaten Manokwari. *Jurnal Triton*, 11(2), 58-67. <https://doi.org/10.47687/jt.v11i2.151>.